



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Mei 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI HERMAWANTO NOOR
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
3. NHK : 204947

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 362.315.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 605 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 62.315.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 171.000.000

1. MOTOR, HONDA CS1 SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 58.457.274**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 591.772.274**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 591.772.274

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Desember 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.